



# Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN





Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta.

Selama 27 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan *Wibawa Seroja Nugraha*.

Sejak 2016 ia menduduki posisi sebagai salah satu Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI).

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email [dadangsol@gmail.com](mailto:dadangsol@gmail.com), HP 0812-9322-202, web <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>



# Materi

- Siklus Manajemen Pembangunan
- Perencanaan dan Percepatan Pembangunan Daerah
- Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
- Simulasi Penyelarasan RPJMD-RPJMN: Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan



# Siklus Manajemen Pembangunan





# Perencanaan Pembangunan Daerah



# Proses Perencanaan



## Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.



## Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



## Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



## Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

# Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)

NASIONAL		DAERAH	
Dokumen	Penetapan	Dokumen	Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)	UU (Ps. 13 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)	Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)	Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)	Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)	Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 21 Ayat 3)

# Persyaratan Dokumen Perencanaan: **SMART**

- **SPECIFIC**-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
- **MEASUREABLE**-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
- **ACHIEVABLE**-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
- **RELEVANT** (information needs of the people who will use the data)
- **TIMELY**-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

# Syarat Perencanaan

**Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:**

1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

# Fungsi/Manfaat Perencanaan

- Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
- Sebagai penuntun arah
- Minimalisasi ketidakpastian
- Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
- Penetapan standar dan pengawasan kualitas



# Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah



# Apa Itu Pembangunan?

**Pembangunan** adalah:

- proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik
- melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

**Tujuan Pembangunan:**

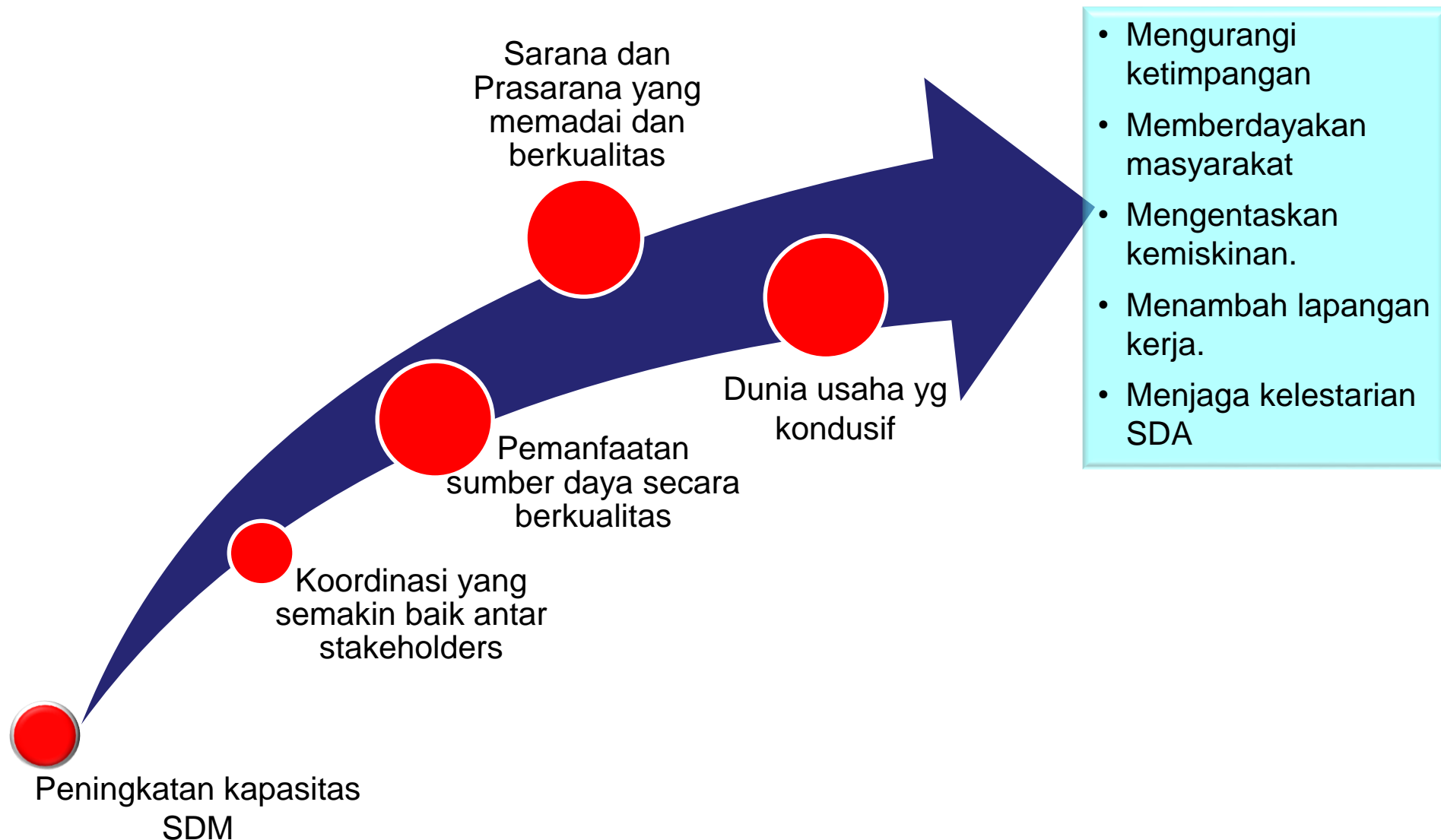
1. **Peningkatan standar hidup (*levels of living*)** setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan **tumbuhnya rasa percaya diri (*self-esteem*)** setiap orang.
3. **Peningkatan kebebasan (*freedom/democracy*)** setiap orang.

Todaro, 2000

# How?

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
  - antar daerah
  - antar sub daerah
  - antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

# Tantangan dalam Pembangunan Daerah



## PEMBANGUNAN DAERAH



## PEMBANGUNAN DI DAERAH



Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang **andal** dan **profesional** dalam:

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- Mengelola sumber daya ekonomi daerah.



Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

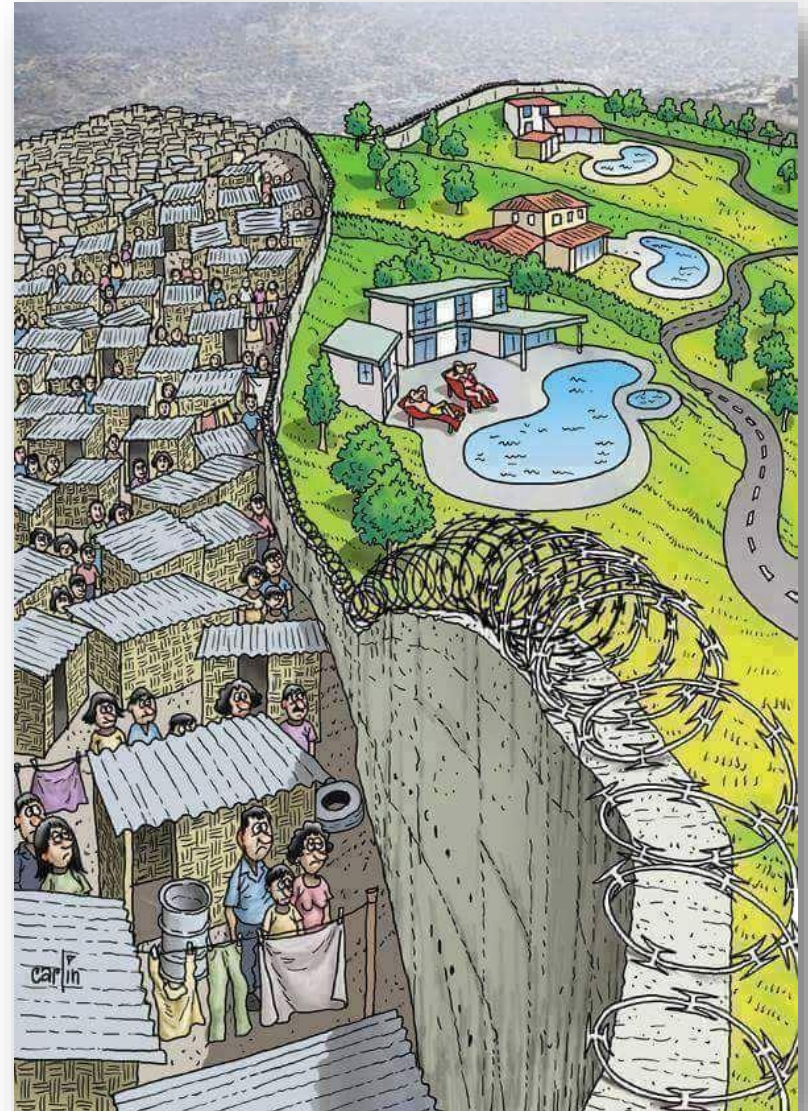
Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:

- Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
- Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

# PEMBANGUNAN BANTAENG



# PEMBANGUNAN DI BANTAENG



# PEMBANGUNAN DAERAH

**Dilaksanakan Melalui:**

**Penguatan Otonomi Daerah**

**Pengelolaan Sumberdaya**

**Good Governance**

**Keseimbangan Peran Tiga Pilar**

**Pemerintahan**

**Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.**

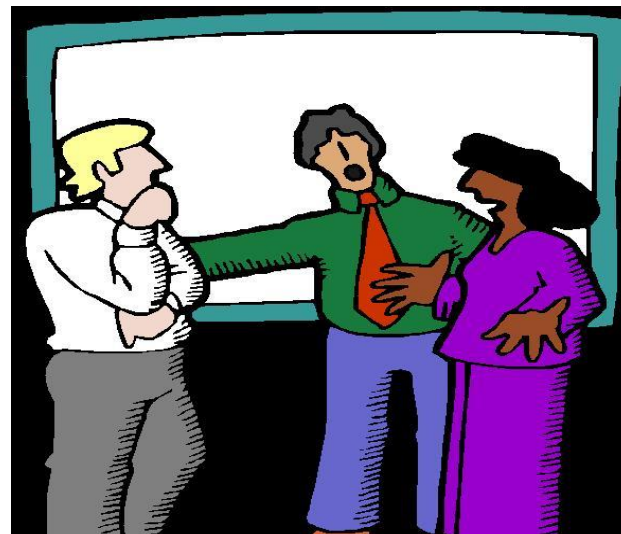
**Dunia Usaha**

**Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.**

**Masyarakat**

**Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.**

# Pergeseran Paradigma: *From Government to Governance*



## Government

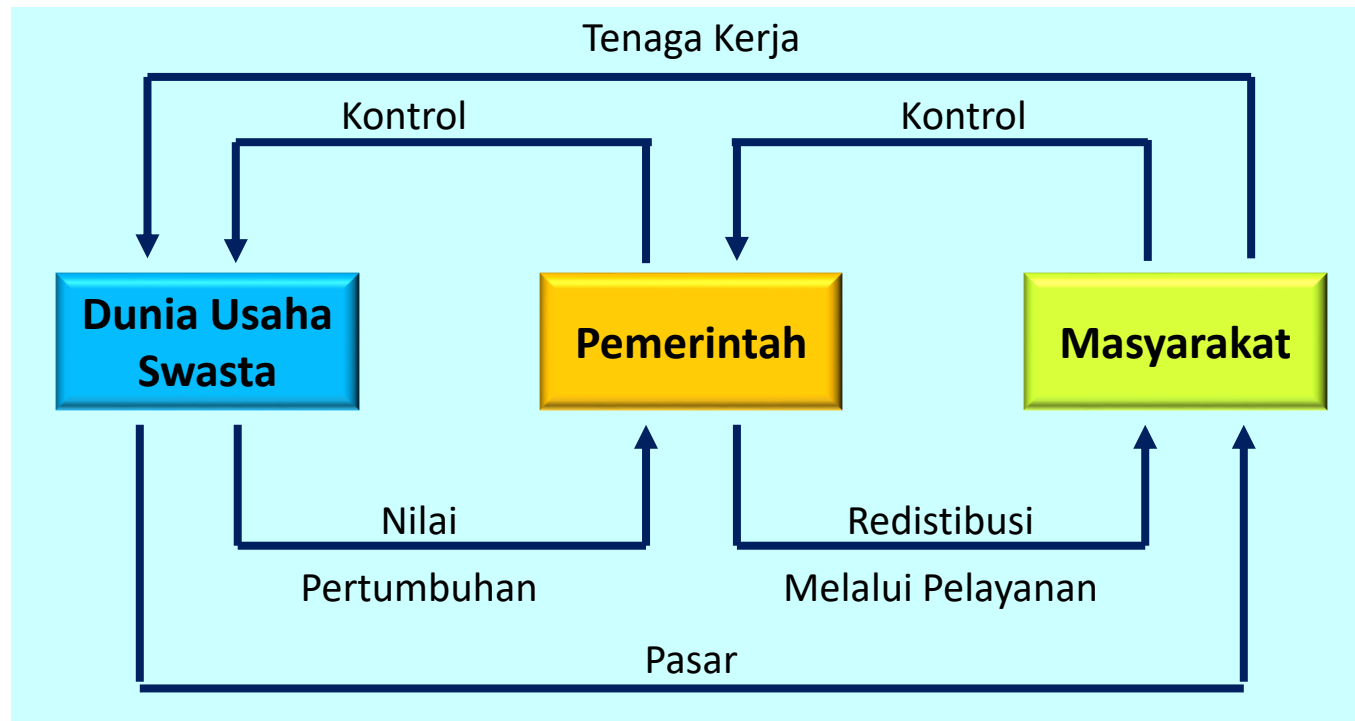
- Memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
- Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

## Governance

- Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, *civil society* dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

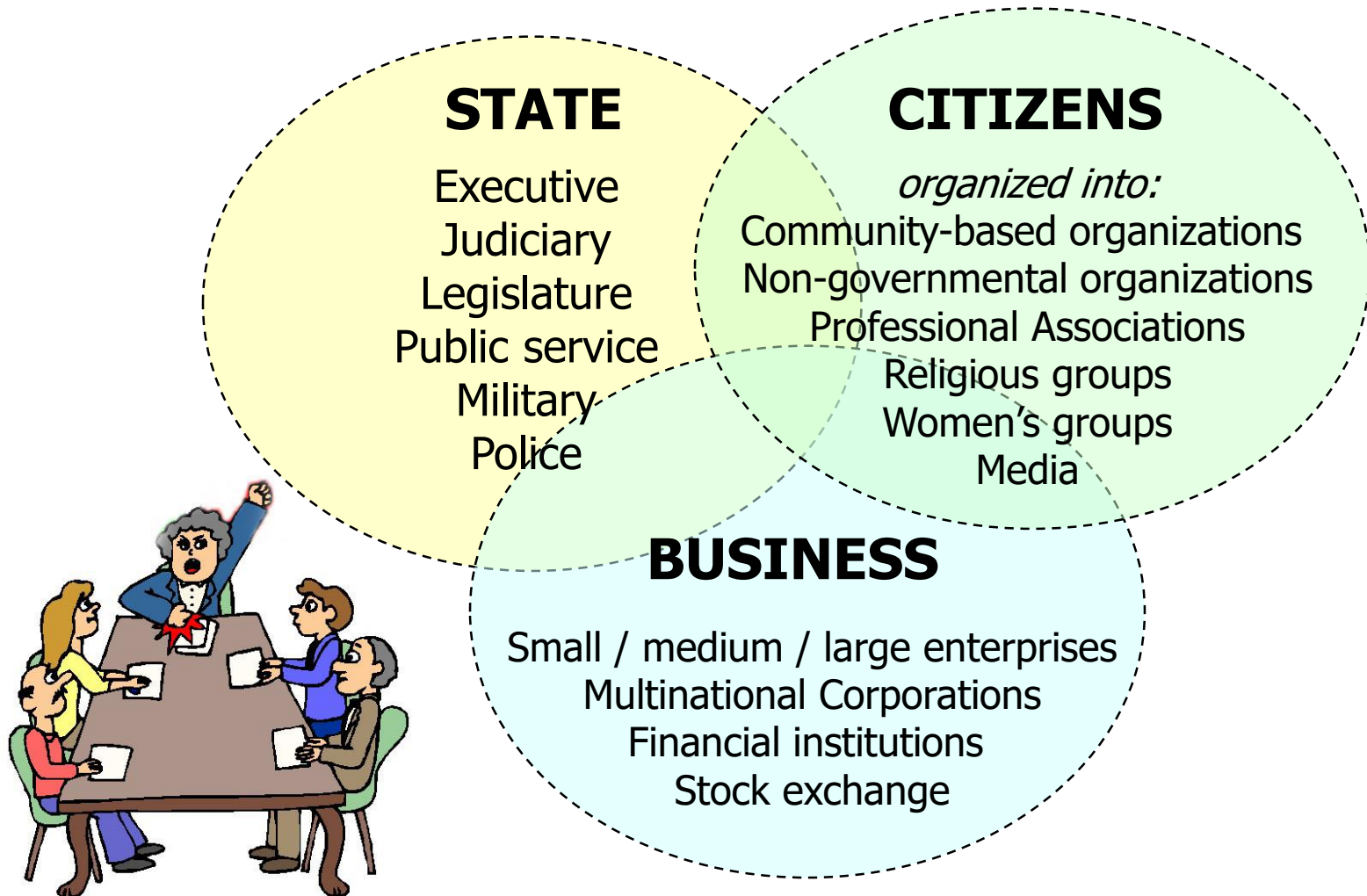
# Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

- ❑ Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.



- ❑ Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka **Governance** akan **Good**.

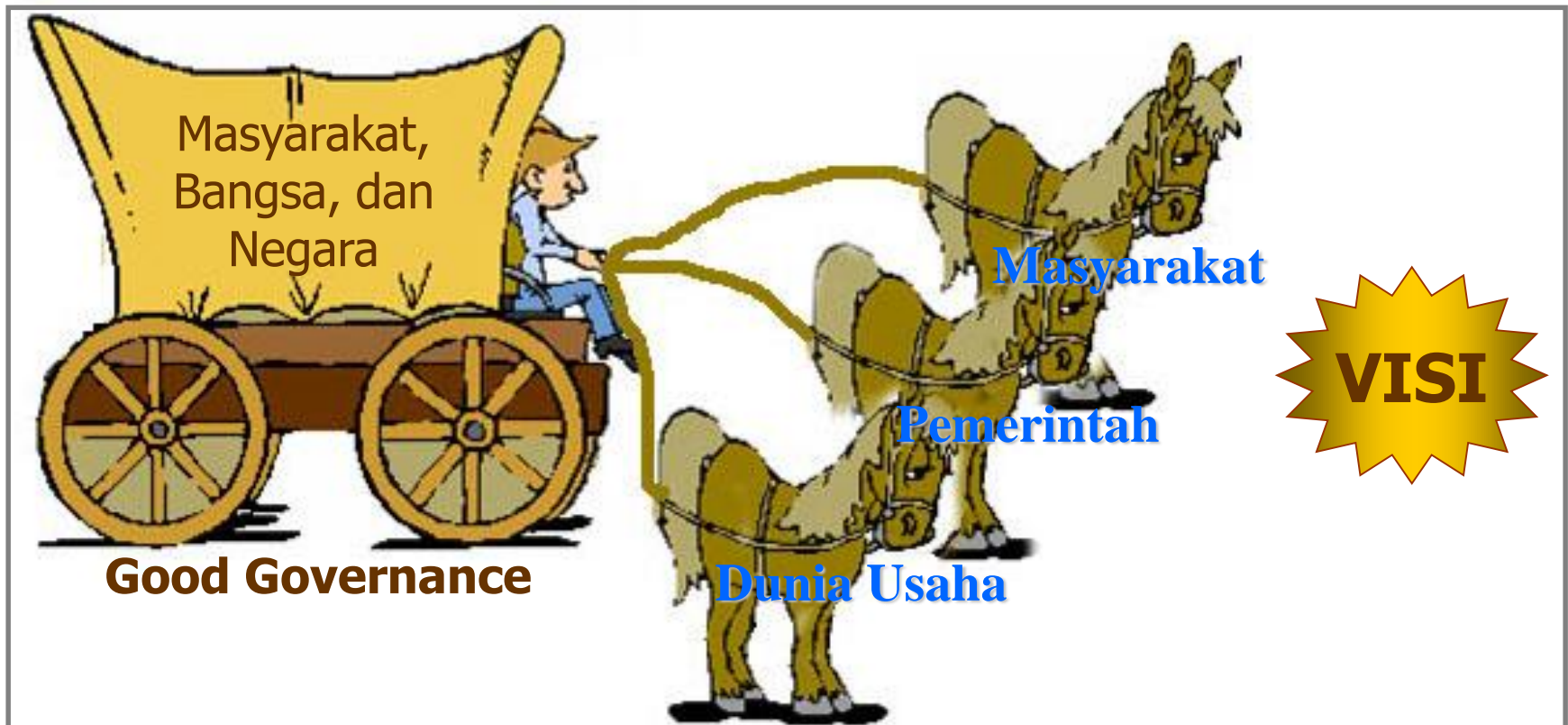
# Pelaku Pembangunan: Stakeholders



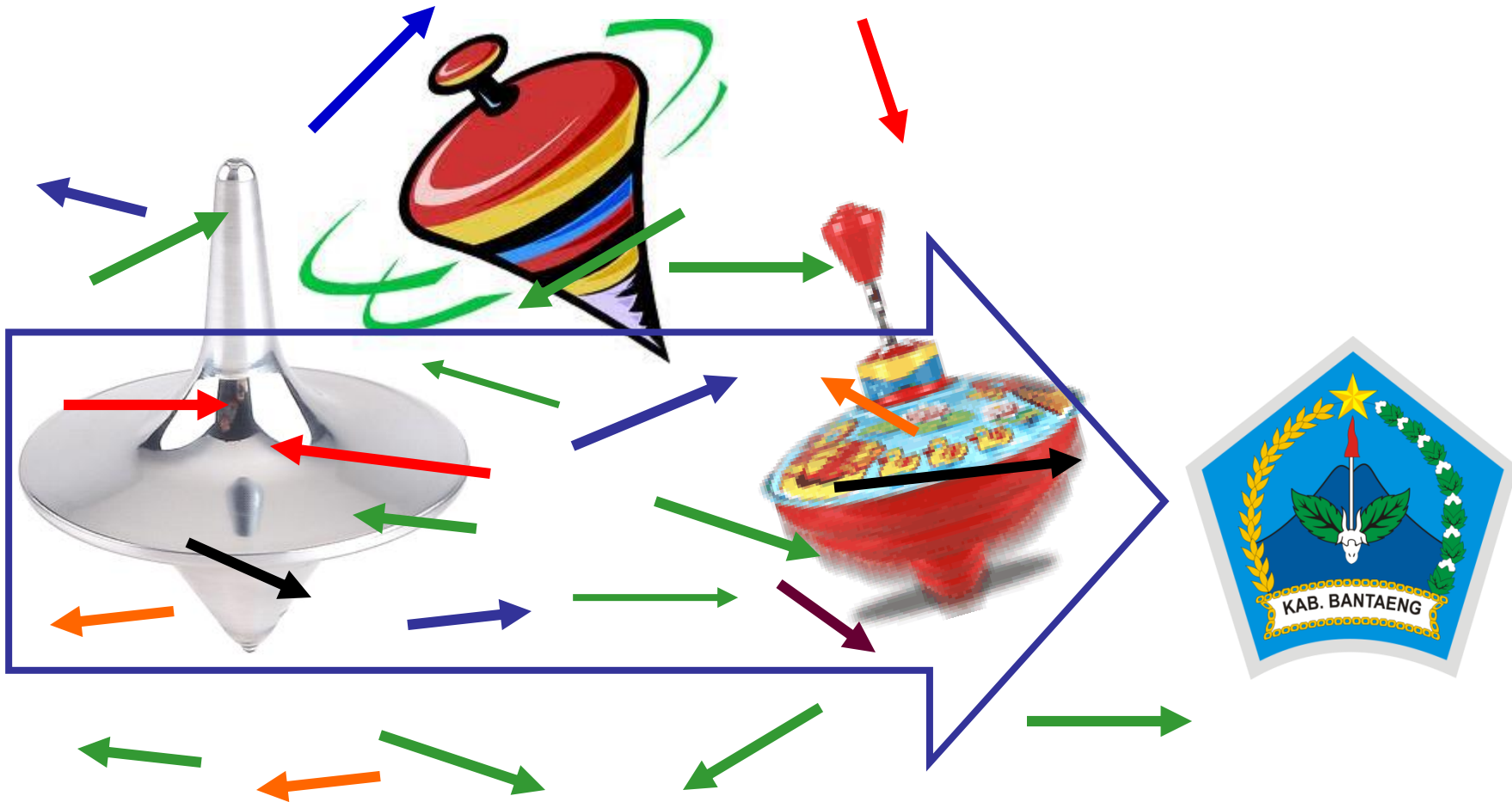
# Troika



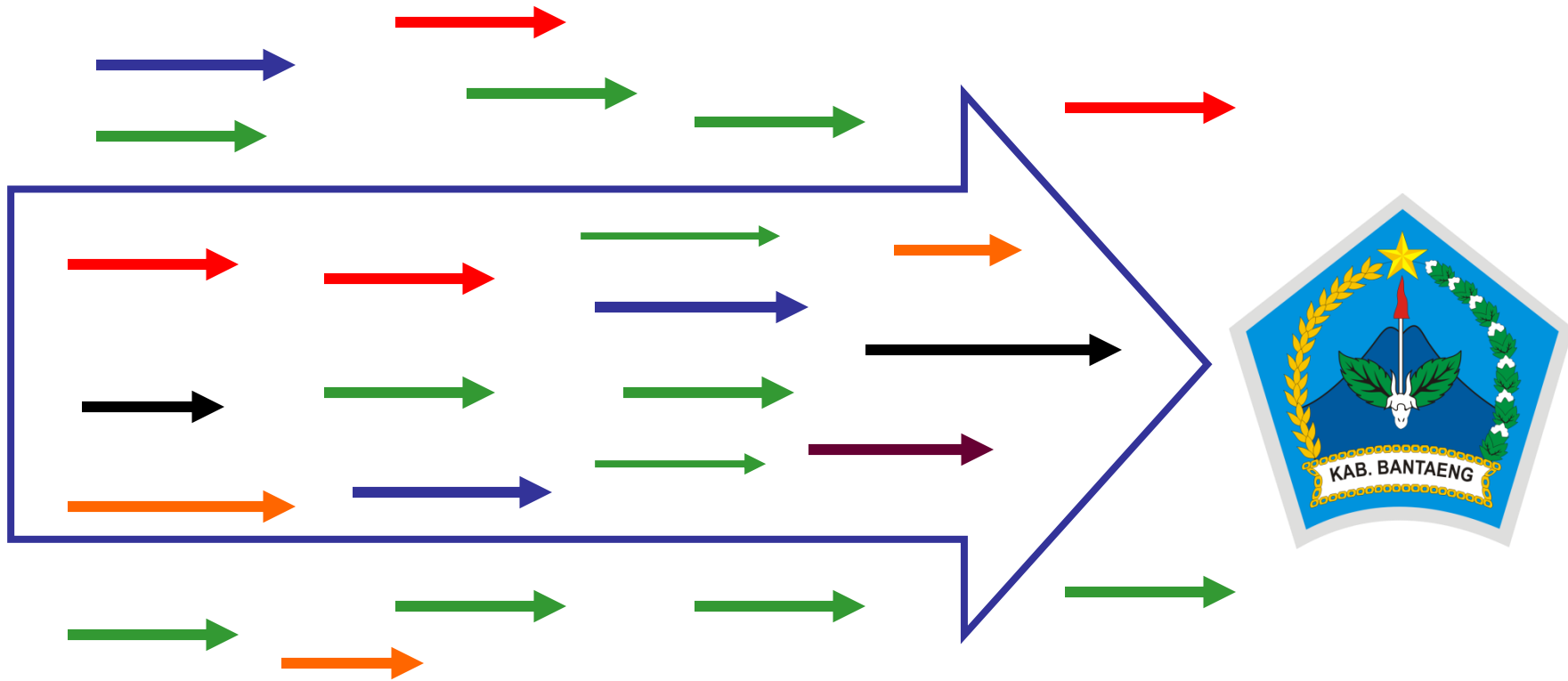
# Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



# Sinergi Stakeholders



# Sinergi Stakeholders





# Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

# Apa itu RPJMD

- RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:
  1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
  2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

# Apa itu RPJMD

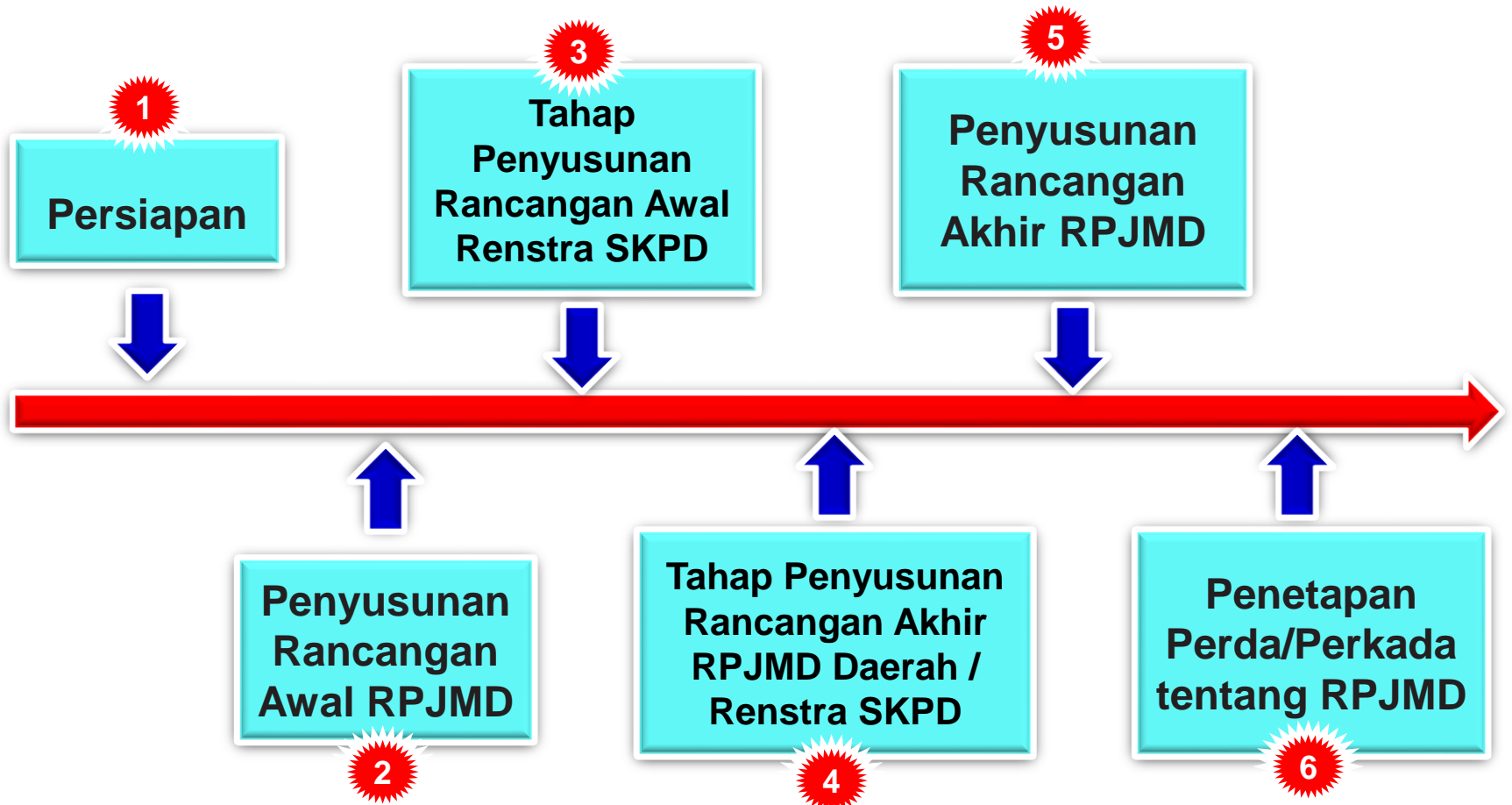
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:

1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

# Substansi RPJMD

- RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
- kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
- yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
- kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.

# Step by Step Penyusunan RPJMD



# Tahap Persiapan

1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD

# Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD

# Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12. Musrenbang RPJMD
13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD



# 4

## Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD

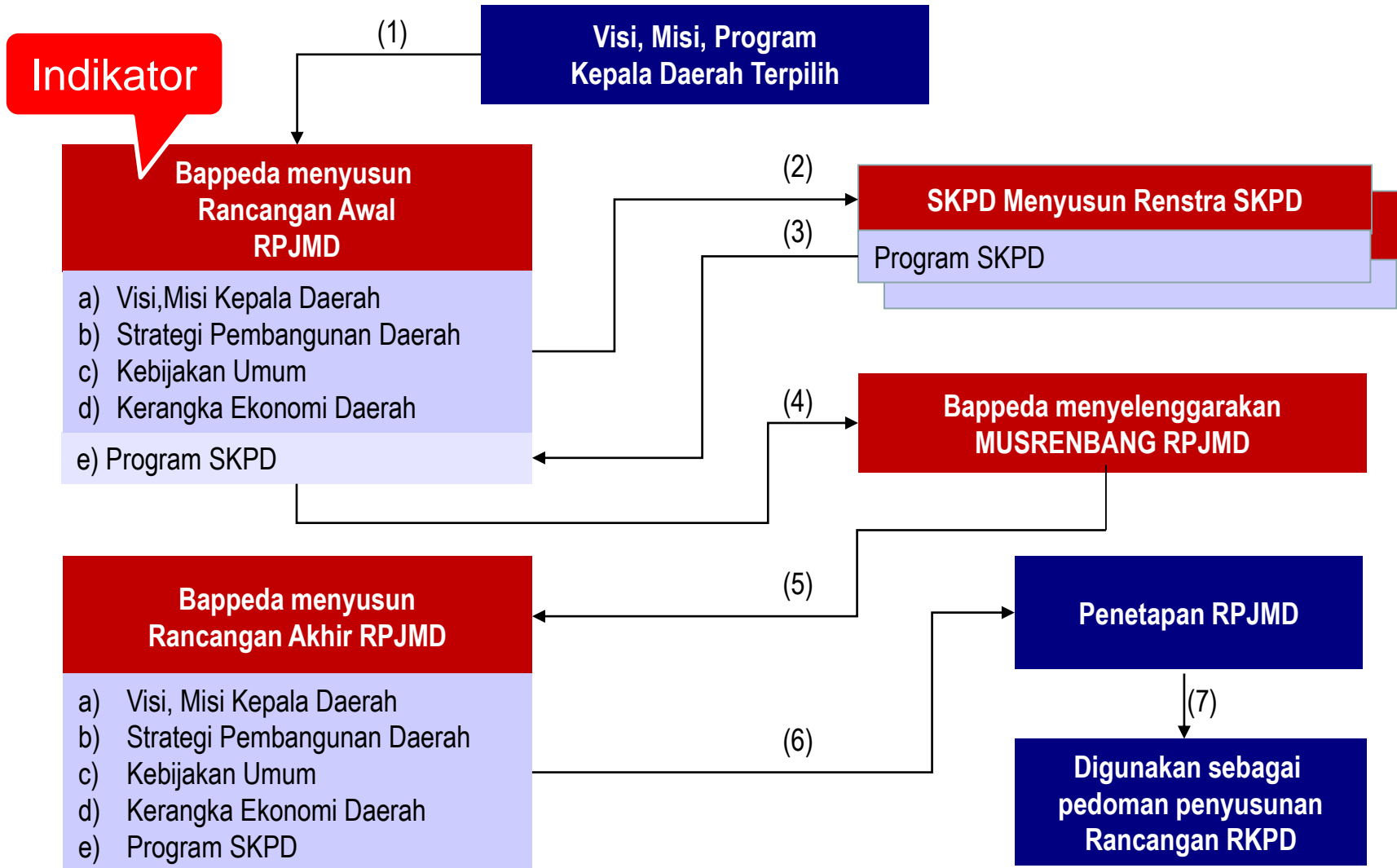
1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD



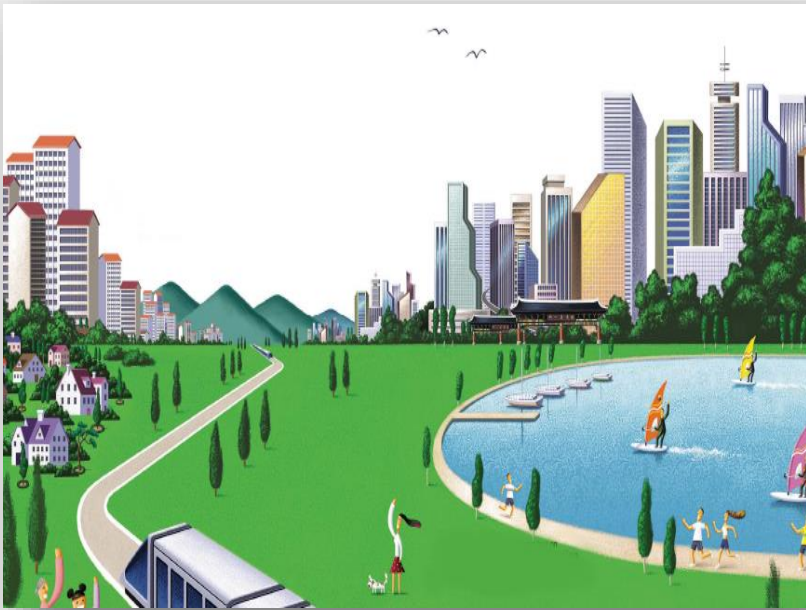
# Tahap Penetapan Perda/Perkada tentang RPJMD

1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan

# Langkah Penyusunan RPJMD



## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Provinsi/Kabupaten/Kota

### Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
- 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

### Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah

Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh

- 2.1 Kondisi Geografis Daerah
- 2.2 Pelayanan Umum
- 2.3 Ketertiban dan Ketentraman
- 2.4 Ekonomi
- 2.5 Lingkungan Hidup
- 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
- 2.7 Kesehatan
- 2.8 Pendidikan

- 2.9 Pariwisata dan Budaya
- 2.10 Pendidikan
- 2.11 Perlindungan sosial
- 2.12 Keuangan Daerah
- 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah

### **Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait**

- 3.1 RPJM Nasional
- 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi)
- 3.3 RPJM Provinsi
- 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/Kota)

### **Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah**

- 4.1 Visi
- 4.2 Misi
- 4.3 Agenda (apabila ada)

### **Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah.

- 5.1 Tujuan
- 5.2 Strategi
- 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi pemerintahan daerah)
- 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

### **Bab VI Program Pembangunan Daerah**

Untuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif

- 6.1 Program Pembangunan
  - 6.1.1 Program SKPD
  - 6.1.2 Program Lintas SKPD
  - 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan

- 6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah

## Bab VII Kaidah Pelaksanaan

Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif

- 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
- 7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD
- 7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD
- 7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas *Non Government Stakeholders* untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD

## Lampiran

Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup:

1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah
2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah
4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja)
5. Proyeksi Fiskal Daerah
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

# Contoh: Outline RPJMD DKI

## **BAB I PENDAHULUAN**

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Landasan Hukum
- Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- Sistematika Penulisan

## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- Kondisi Geografis
- Kondisi Demografi
- Sumber Kekayaan Alam
- Kondisi menurut Aspek Kehidupan
- Kondisi menurut Urusan Pemerintahan

## **BAB III VISI DAN MISI**

- Visi
- Misi

## **BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH**

- Tujuan Pembangunan Daerah
- Strategi Pembangunan Daerah
- Pendekatan

## **BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH**

- Urusan Wajib
- Urusan Pemerintahan

## **BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH**

- Umum
- Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
- Arah Kebijakan Belanja Daerah
- Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

## **BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

- Program Dedicated
- Program menurut Urusan Pemerintahan
- Program Kewilayahan

## **BAB VIII PENUTUP**

# Evaluasi Kualitas RPJMD

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah   | ✓ . |
| 2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah   | ✓ . |
| 3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih <u>sesuai dengan</u> :  | ✓ . |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (<i>strengths</i>) dan mengatasi kelemahan (<i>weaknesses</i>)</li> </ul> |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (<i>opportunities</i>) dan mengatasi ancaman (<i>threats</i>)</li> </ul> |     |

# Evaluasi Kualitas RPJMD

<p>4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah <u>sesuai dengan</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (<i>strengths</i>) dan mengatasi kelemahan (<i>weaknesses</i>)</li> <li>▪ Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (<i>opportunities</i>) dan mengatasi ancaman (<i>threats</i>)</li> </ul>	<p>✓ .</p>
<p>5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.</p>	<p>✓ .</p>
<p>6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah.</p>	<p>✓ .</p>

# Evaluasi Kualitas RPJMD

7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah <u>sesuai dengan</u> rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah	✓ .
8. Rumusan program pembangunan daerah <u>sesuai dengan</u> kendala fiskal daerah	✓ .
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional	✓ .
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD	✓ .
11. Kualitas RPJMD sudah SMART	✓ .



# Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019

# Penyelarasan Sasaran Makro

Indikator	Target RPJMD	Target RPJMN
Pertumbuhan Ekonomi		
Tingkat Pengangguran		
Tingkat Kemiskinan		



# Penyelarasan Sasaran Pokok

Sasaran	Ya	Tidak	Target RPJMD	Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD)
<b>I. Sasaran Makro</b>				
<b>Pembangunan Manusia dan Masyarakat</b>				
1. Indeks Pembangunan Manusia				
2. Indeks Pembangunan Masyarakat				
3. Indeks Gini				
4. Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan				
4. Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan				
- Pekerja Formal				
- Pekerja Informal				
Dst...				

# Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sulawesi Per Provinsi 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sulawesi Utara	7.1	7.2	7.8	7.8	8.3
Gorontalo	6.7	7.2	8.4	8.6	8.9
Sulawesi Tengah	7.6	7.7	8.1	8.3	8.9
Sulawesi Selatan	7.4	7.4	8.3	9.1	9.1
Sulawesi Barat	8.1	9.8	10.1	10.2	10.4
Sulawesi Tenggara	7.8	8.0	8.2	10.1	10.3

# Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Sulawesi Per Provinsi 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sulawesi Utara	7.1	6.6	6.1	5.6	5.1
Gorontalo	15.9	14.7	14.1	12.4	11.2
Sulawesi Tengah	13.7	12.7	11.7	10.7	9.7
Sulawesi Selatan	9.1	8.5	7.9	7.2	6.6
Sulawesi Barat	10.2	9.4	8.7	7.9	7.1
Sulawesi Tenggara	13.5	12.4	11.4	10.4	9.3

# Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Sulawesi Per Provinsi 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sulawesi Utara	7.2	7.0	6.7	6.5	6.3
Gorontalo	4.0	3.8	3.7	3.5	3.4
Sulawesi Tengah	3.6	3.5	3.4	3.2	3.1
Sulawesi Selatan	5.6	5.4	5.2	5.0	4.4
Sulawesi Barat	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8
Sulawesi Tenggara	3.7	3.5	3.4	3.2	3.0



# Simulasi Penyelarasan RPJMD-RPJMN

**Kegiatan Strategis Jangka Menengah  
Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan**

# PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

RPJMN	RPJMD Prov Sulsel	RPJMD Kabupaten Bantaeng
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan jalur KA antara Makassar - Pare-Pare</li><li>2. Pembangunan jalur KA Pare-Pare – Mamuju- Isimu</li><li>3. Pembangunan KA Perkotaan Mamminasata (tahap 1)*</li><li>4. Pembangunan Jalur KA Makassar-Bulukumba-Watampone</li></ol>		

# PERHUBUNGAN DARAT

RPJMN	RPJMD Prov Sulsel	RPJMD Kabupaten Bantaeng
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Makassar* 2. Pembangunan kampus Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) di Makassar		

# PERHUBUNGAN UDARA

RPJMN	RPJMD Prov Sulsel	RPJMD Kabupaten Bantaeng
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin -Pembangunan Terminal II di Kawasan Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar*</li><li>2. Pembangunan kampus Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) di Makassar</li><li>3. Bandara Buntu Kunik (Pindahan dari SULBAR)</li></ol>		

# PERHUBUNGAN LAUT

RPJMN	RPJMD Prov Sulsel	RPJMD Kabupaten Bantaeng
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Pelabuhan Pare-pare</li><li>2. Perluasan Pelabuhan Makassar (Makassar New Port)*</li><li>3. Pengembangan Pelabuhan Garongkong</li><li>4. Pengembangan Pelabuhan Munte</li><li>5. Pengembangan Pelabuhan Jeneponto</li><li>6. Pengembangan Pelabuhan Sabutung</li><li>7. Pengembangan Pelabuhan Sapuka</li><li>8. Pengembangan Pelabuhan Sailus</li><li>9. Pengembangan Pelabuhan Kalukalukuang</li></ol>		

# PERHUBUNGAN LAUT

RPJMN	RPJMD Prov Sulsel	RPJMD Kabupaten Bantaeng
10. Pengembangan Pelabuhan Benteng 11. Pengembangan Pelabuhan Bajoe 12. Pengembangan Pelabuhan Pattirobajo 13. Pengembangan Pelabuhan Sinjai 14. Pengembangan Pelabuhan Paotere 15. Pembangunan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran di Makassar		

# JALAN

RPJMN	RPJMD Prov Sulsel	RPJMD Kabupaten Bantaeng
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Fly Over - Akses Bandara Internasional Sultan Hasanuddin</li><li>2. Pembangunan Jalan baypass Maminasata</li><li>3. Pembangunan Jalan Seseng - Bts.Sulbar</li><li>4. Pembangunan Jalan Trans Sulawesi Mamminasata (Middle Ring Road)</li><li>5. Pembangunan Under Pass A.P. Pettarani</li><li>6. Pembangunan Jalan Kaluku - Sae - Talang – Sabang</li></ol>		

# ASDP

RPJMN	RPJMD Prov Sulse	RPJMD Kabupaten Bantaeng
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Garongkong 2. Pengembangan Pel. Penyeberangan Sinjai Lintas Konawe 3. Pembangunan Fisik Fasilitas Penyeberangan Pada Lintasan Bajoe 4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Gangga* 5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Jampea*		

# ASDP

RPJMN	RPJMD Prov Sulsel	RPJMD Kabupaten Bantaeng
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Maros* 7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pare-Pare* 8. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Ujung Lero* 9. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bangsalae Siwa* 10. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Bira*		

# KETENAGALISTRIKAN

RPJMN	RPJMD Prov Sulsel	RPJMD Kabupaten Bantaeng
1. PLTGU Makassar Peaker 300 MW 2. PLTGU Sulsel Peaker 300 MW 3. PLTU Sulsel 2 200 MW 4. PLTGU Makassar Peaker 150 MW 5. PLTGU Sulsel Peaker 150 MW 6. PLTU Jeneponto 2 250 MW 7. PLTG/MG Mobile PP Sulsel (Tallo Lama) 100 MW 8. PLTU Sulsel Barru – 2 100 MW 9. PLTG/MG Mobile PP Sulsel (Tello) 50 MW 10. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi		

# TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RPJMN	RPJMD Prov Sulsel	RPJMD Kabupaten Bantaeng
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota 2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI		

# SUMBER DAYA AIR

RPJMN	RPJMD Prov Sulsel	RPJMD Kabupaten Bantaeng
1. Pembangunan Bendungan Karalloe Gowa 2. Pembangunan DI Pamukulu Takalar 3. Pembangunan Waduk Paselloreng Gowa 4. Pembangunan Waduk Nipa-Nipa Maros 5. Pembangunan Jaringan Irigasi Bayang-Bayang Bulukumba 6. Pembangunan Bendungan Cinemabella Selayar		

# SUMBER DAYA AIR

RPJMN	RPJMD Prov Sulsel	RPJMD Kabupaten Bantaeng
7. Pembangunan Bendungan Posi Selayar 8. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irgasi D.I. Baliase Luwu Utara 9. Pembangunan Bendung D.I. Baliase Luwu Utara 10. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Baliase Luwu Utara 11. Rehabilitasi Konstruksi dan Pintu Bendung Benteng Pinrang 12. Pembangunan Perkuatan Tebing Bagian Hulu Bendung Gerak Tempe Wajo		

# SUMBER DAYA AIR

RPJMN	RPJMD Prov Sulsel	RPJMD Kabupaten Bantaeng
13. Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air Sungai Taroang dan Muara Sungai Tamanroya Jeneponto 14. Pemataan Sungai Tallo dengan Foto Udara Kt. MakaSul-Selar 15. Pengendalian Banjir dan Perbaikan Alur Sungai Kalaena dan Sungai Angkona Luwu Timur 16. Pekerjaan Pengendalian Banjir Sungai Rongkong Luwu Utara 17. Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air Sungai Baliase Luwu		

# SUMBER DAYA AIR

RPJMN	RPJMD Prov Sulsel	RPJMD Kabupaten Bantaeng
18.Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air Sungai Kanjiro Luwu 19.Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air Sungai Bone-Bone Luwu 20.Pengendalian Banjir Sungai Cenranae Wajo-Bone 21.Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air Sungai Walanae Soppeng 22.Construction of Giant Sand Trap Gowa 23.Construction of Water Selected Intake Gowa 24.Construction of three Sabo Dam No 8-1, 8-2, & 8-3 Gowa		

# SUMBER DAYA AIR

RPJMN	RPJMD Prov Sulsel	RPJMD Kabupaten Bantaeng
25. Construction of Two Sabo Dam No 8-4 & 8-5 Gowa 26. Rehabilitasi Bangunan Pengendali Sedimen Bagian Hulu Gowa 27. Penggalan Hulu Waduk Bili-Bili Gowa 28. Pembangunan Konsolidasi Dam Gowa 29. Pembangunan Sand Pocket Gowa 30. Pembangunan Bendungan Jenelata Gowa 31. Pembangunan DPS Rongkong Kab. Luwu Utara Luwu Utara 32. Pemb. Pengaman Abrasi Pantai Tanaberu Bulukumba 33. Pemb. Pengaman Abrasi Pantai Lengnga Pinrang 34. Pembangunan Embung Air Baku di Kab. Luwu Utara (7 buah) Luwu Utara		

# PENDIDIKAN

RPJMN	RPJMD Prov Sulsel	RPJMD Kabupaten Bantaeng
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan USB (Boarding School) universal Provinsi Sulawesi Selatan Usulan sebesar Rp 90 Miliar</li><li>2. Meningkatkan angka melek aksara minimal menjadi 95% melalui PKBM</li><li>3. Pengembangan pendidikan vokasional (penerbangan, pramugari, pertanian, perkebunan, perikanan)</li><li>4. Pembinaan SMK yang dikembangkan menjadi sekolah model</li><li>5. Pengembangan PAUD</li><li>6. Pengembangan politeknik lingkungan hidup</li></ol>		

# Terima Kasih

